



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ERMANTO**
2. Jabatan : **DEKAN**
3. NHK : **260454**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **980.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/77 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 380 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000
3. Tanah Seluas 213 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 107 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 84 m2/36 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **180.400.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
3. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
4. MOBIL, HONDA HONDA HRV Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **5.200.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	183.481.508
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.349.081.508
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.349.081.508

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.